

PENGARUH DUKUNGAN ATASAN, KEJELASAN TUJUAN, DAN PELATIHAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Sedianingsih¹
Yunita Eka Safitri²
Rizky Amalia Sinulingga³

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of supervisor support on the implementation of Regional Financial Accounting Systems (SAKD). This study use a quantitative method using primary data in the form of questionnaires. Questionnaires amounting to 100 were distributed to employees of the regional apparatus organization in Banyuwangi district who held positions as heads of agencies, secretaries, and finance departements. The results of the respondent's answers from filling out the quistionnaire were processed using partial least square (PLS) analysis using the Smart PLS application. The results of this study indicate that supervisor support influences the implementation of SAKD, clarity of purpose does not affect the implementation of SAKD, and training affect the implementation of SAKD. The results of this study are expected to be a source of consideration and input for the local government on how organizational behaviour can influences SAKD to provide a transparant and accountable information. Supervisor support and training can support employees to generate financial reports within providing resources (systems) to facilitate their work.

Keyword : *Supervisor Support, Clarity of Purpose, Training, Financial Accounting System*

ARTICLE INFO

Article History:

Received 23 November 2019

Accepted 18 April 2020

Available online 31 May 2020

Pendahuluan

Organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, sekolah-sekolah, yayasan, PUSKESMAS, rumah sakit, dan tempat ibadah merupakan jenis organisasi sektor publik yang menggunakan dana dari masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Bastian, 2010). Pemerintah Daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah saat ini telah menerapkan sistem otonomi daerah dalam mengatur sumber daya nasional dengan mendistribusikan hak, kewajiban, dan wewenang sudah disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat.

¹ Corresponden Author : Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Telp. 085693763561
Email : sedianingsih@feb.unair.ac.id

² Second Author : Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Telp. 087793313808
Email : yunita2960@gmail.com

³ Third Author : Dosen Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Telp. 081221052988
Email : rizkyamalia@vokasi.unair.ac.id

Sumber daya nasional yang diberikan kepada pemerintah daerah dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penerapan sistem otonomi daerah menuntut pemerintah daerah mengatur sistem manajemennya secara mandiri, salah satunya yaitu mampu menghasilkan laporan keuangan yang handal sehingga dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Namun, penyelewengan pada laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah masih banyak terjadi di Indonesia. Sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada beberapa pemerintah daerah, dan mengungkapkan adanya korupsi yang dilakukan oleh 28 kepala daerah. Kebanyakan pemerintah daerah tidak bisa menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik sehingga mudah dilakukan manipulasi laporan keuangan pemerintah daerah, seperti dilakukannya *lapping* dimana utang proyek tahun ini dibayar dengan APBD tahun berikutnya, yang sebenarnya dalam pengelolaan keuangan daerah ada aturan bahwa tidak boleh melakukan kegiatan jika tidak ada anggarannya.

Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem keuangan yang andal untuk menggantikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lama yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah secara Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA). MAKUDA dirasa sudah tidak bisa mendukung kebutuhan pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang handal. Permendagri No 64 tahun 2013 Pasal 5 menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik dan metode untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

Pengembangan sistem baru memerlukan suatu perencanaan yang matang serta pengimplementasian yang hati-hati untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Suatu keberhasilan dalam pengembangan sistem tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknis yang dimiliki, tetapi juga ditentukan oleh faktor perilaku dari individu sebagai pengguna sistem. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bodnar dan Hopwood (2006) bahwa faktor teknis, perilaku, situasi, dan personel harus dipertimbangkan sejak awal, apabila ada kegagalan dalam mempertimbangkan faktor tersebut maka output sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna.

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa dalam konteks penggunaan teknologi informasi, seseorang akan menggunakan teknologi atau inovasi baru apabila dapat memberikan manfaat yang positif dari penggunaan teknologi informasi tersebut dan juga dapat berguna bagi banyak pihak. Faktor keperilakuan dan penggunaan inovasi teknologi informasi yang saling bersinergi akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah dan Sabeni (2007) tentang peran konflik dan faktor organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan) terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, menunjukkan hasil hanya dukungan atasan yang berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan kejelasan tujuan dan pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yulistia *et al.*, (2017) membuktikan bahwa pelatihan dan kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan dukungan atasan berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan Sari (2017) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan dan pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Adanya sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tentunya memberikan kemudahan bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan manfaat agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang didukung oleh faktor keperilakuan. Faktor dukungan atasan dibutuhkan agar karyawan dapat diberikan motivasi dan masukkan untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor kejelasan tujuan diperlukan agar sasaran dan target yang hendak dicapai oleh organisasi dapat diketahui oleh pegawai. Faktor pelatihan dibutuhkan agar dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan. Peningkatan kemampuan yang dimiliki pegawai dalam mengoperasikan sistem berdampak pada target atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi.

Inkonsistensi hasil penelitian memotivasi peneliti untuk meneliti lebih lanjut, sebab pentingnya faktor-faktor seperti dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan menjadi suksesi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi mendapatkan predikat terbaik sebagai kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah dan inovasi pelayanan publik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2017 (bpkad.banyuwangikab.go.id, 2017). Salah satu pemicunya adalah adanya dukungan dan motivasi yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Bupati) agar para pegawainya dapat mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengoptimalkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyediakan informasi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan sumber daya yang dimiliki.

Tinjauan Pustaka

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM merupakan salah satu teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses pemanfaatan sistem informasi (Fatmawati, 2015). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi atau inovasi baru apabila dapat memberikan manfaat yang positif dari penggunaan teknologi informasi tersebut dan juga dapat berguna bagi banyak pihak. Menurut Davis (1989), ada dua faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi yaitu *Ease of Use Perceived* (Persepsi Kemudahan Penggunaan) dan *Usefulness Perceived* (Persepsi Kebermanfaatan).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)*, faktor persepsi kemudahan penggunaan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bisa memberikan kemudahan bagi pegawai OPD untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang kedua yaitu persepsi kebermanfaatan, dalam penelitian ini yaitu OPD percaya bahwa dengan menggunakan SAKD maka akan memberikan manfaat di berbagai aspek, seperti dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dukungan Atasan

Menurut Chenhall (2004), Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer atau atasan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi sebuah sistem yang digunakan. Upaya mengembangkan daya inovatif bawahannya, dukungan atasan menjadi aspek penting karena atasan memiliki kekuasaan atas sumber daya yang dibutuhkan. Hubungan yang saling mendukung antara atasan dan bawahan akan membentuk kerja sama yang solid sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat direalisasikan dengan baik.

Kejelasan Tujuan

Chenhall (2004) mendefinisikan kejelasan tujuan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di semua level organisasi sehingga individu dapat meningkatkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan tujuan dapat dilaksanakan dengan dukungan dari keterampilan dan kompetensi yang dimiliki karyawan dalam menggunakan sistem yang ada. Kejelasan tujuan tentunya akan mendorong organisasi dalam melakukan perencanaan yang lebih matang sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pelatihan

Menurut Sari (2017), pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan dan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan diharapkan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan perusahaan. Bagi karyawan baru pelatihan berguna untuk meningkatkan wawasan karyawan mengenai pengoperasian sistem, sedangkan bagi karyawan lama pelatihan berguna untuk lebih meningkatkan hasil pekerjaannya.

Pengertian Akuntansi

Menurut Warren *et al.*,(2014) akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah bisnis. Ada dua jenis akuntansi apabila dilihat dari entitas penyusunan laporan keuangan yaitu akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat (bisnis). Akuntansi sektor privat (bisnis) berkaitan dengan organisasi perusahaan di bidang bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan akuntansi sektor publik berkaitan dengan organisasi pemerintahan yang bertujuan memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan (Bastian, 2010).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah pasal 5 yang berbunyi bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Bastian (2006) mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data keuangan daerah dan data lainnya yang berkaitan menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

Kebijakan Akuntansi

Permendagri Nomor 64 tahun 2013, memuat mengenai kebijakan akuntansi untuk pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kepala daerah. Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Selain itu, kebijakan akuntansi untuk pemerintah daerah harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik dan metode untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dukungan atasan dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Dukungan atasan dalam sebuah instansi pemerintahan sangat penting dalam menentukan seberapa efektivitas penerimaan informasi dalam organisasi, dan manajemen puncak mengetahui rencana instansi pemerintahan sehingga peraturan baru yang akan dikembangkan harus sesuai dengan rencana instansi pemerintahan (Irsyadi, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulistia *et al.*,(2017) menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Dukungan atasan dalam

berbagai aktivitas yang dapat menambah kemampuan organisasi dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan penggunaan sistem akuntansi secara maksimal. Oleh karena itu, dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

H1: Dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Kejelasan Tujuan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan yang jelas dalam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dapat memotivasi pegawainya agar dapat menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan baik sehingga tujuan dari OPD dapat tercapai, karena dengan adanya tujuan yang jelas maka akan meningkatkan kesadaran pegawai bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Kejelasan tujuan yang disampaikan oleh atasan dapat mempengaruhi perilaku para pegawai dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal. Oleh karena itu, kejelasan tujuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

H2: Kejelasan tujuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Pelatihan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan peningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004). Secara umum tujuan diadakannya pelatihan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan dan juga untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada, dan diharapkan baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Pelatihan yang diberikan dapat menambah pengetahuan dan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga terjadi proses kerja timbal balik yang saling bersinergi dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

H3: Pelatihan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *eksplanatory research* yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel bebas dengan variabel terikat dengan dilakukan uji hipotesis. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kausal karena dirancang untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel. Hubungan sebab-akibat yang diteliti dalam studi ini adalah pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer pada penelitian ini berupa persepsi/pendapat pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi. Sumber data primer diperoleh dari secara langsung dengan memberikan kuesioner kepada responden.

Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan metode angket. Peneliti menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yaitu pegawai OPD Kabupaten Banyuwangi. Penyebaran angket (kuesioner), peneliti datang secara langsung dengan memberikan kuesioner kepada responden. Angket yang telah diisi oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu agar angket yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikuti sertakan dalam analisis.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai OPD Kabupaten Banyuwangi yaitu berjumlah 10.224. Penentuan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *nonprobability* sampling dengan metode sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2)+1} \dots\dots\dots (1)$$
$$n = \frac{10.224}{10.224(0,1^2)+1} = 99,031 \approx 100$$

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dukungan Atasan (X1)

Dukungan atasan adalah keterlibatan manajer atau atasan dalam mendukung keberhasilan pengimplementasian sebuah sistem, karena atasan mempunyai kekuasaan atas sumber daya yang dibutuhkan. Dukungan atasan diukur menggunakan tiga indikator menurut Nurdin (2012) dalam Yulistia *et al.*,(2017) yaitu (1) partisipasi dan tindakan nyata dari atasan yang ikut bekerja bersama-sama dengan anggota organisasi lainnya; (2) motivator sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi yang dapat mendorong bawahannya untuk dapat mencapai target; (3) *reward* sebagai penghargaan yang diberikan kepada para pegawainya ketika dapat mencapai target yang telah direncanakan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dukungan atasan terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan yang dibangun oleh Yulistia *et al.*,(2017) yang telah dimodifikasi.

Kejelasan Tujuan (X2)

Kejelasan tujuan adalah informasi yang ada di dalam sebuah organisasi dan berhubungan dengan kejelasan dari sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Kejelasan tujuan diukur dengan menggunakan lima indikator menurut Nurdin (2012) dalam Yulistia *et al.*,(2017) yaitu (1) transparansi sasaran, merupakan keterbukaan di dalam perusahaan dengan anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus

dicapai; (2) perencanaan rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan; (3) target yang merupakan standar sasaran yang dibebankan kepada masing-masing anggota organisasi; (4) pengawasan yang dilakukan oleh manajemen terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan; (5) sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang diharuskan perusahaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kejelasan tujuan terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan yang dibangun oleh Yulistia *et al.*, (2017) yang telah dimodifikasi.

Pelatihan (X3)

Pelatihan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan para pegawainya dalam mengoperasikan sebuah sistem. Pelatihan diukur menggunakan 4 (empat) indikator menurut Dessler (2003) dalam Yulistia *et al.*, (2017) yaitu (1) reaksi pegawai terhadap program pelatihan yang telah diberikan; (2) pembelajaran, melakukan pengujian terhadap sesuatu yang telah dipelajari sesuai dengan prinsip, keterampilan, dan fakta yang seharusnya; (3) perilaku, mengevaluasi bagaimana perilaku pegawai yang telah menyelesaikan pelatihan; (4) hasil, mengevaluasi keseluruhan dari hasil akhir setelah dilakukannya pelatihan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pelatihan terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan yang dibangun oleh Yulistia *et al.*, (2017) yang telah dimodifikasi.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (Y)

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data keuangan daerah dan data lainnya yang berkaitan menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Bastian, 2006). Sistem akuntansi keuangan daerah diukur menggunakan indikator menurut Chenhall (2004) dalam Yulistia *et al.*, (2017) yaitu (1) *validity*, informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang digunakan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi; (2) *reliability*, informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi adalah informasi yang dapat dipercaya; (3) efisien, melalui sistem akuntansi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya; (4) efektif, melalui sistem akuntansi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan yang dibangun oleh Yulistia *et al.*, (2017) yang telah dimodifikasi.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan aplikasi smartPLS. PLS dapat digunakan untuk menganalisis *construct* yang dibuat berdasarkan dua indikator yaitu reflektif dan formatif. Untuk mengetahui persamaan linear yang digunakan dalam membentuk variabel yang digunakan dalam penelitian, berikut merupakan persamaan regresi yang dapat dibentuk:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 $b_1 - b_3$ = Koefisien jalur variabel independen terhadap dependen
 X_1 = Dukungan Atasan
 X_2 = Kejelasan Tujuan
 X_3 = Pelatihan
 e = Tingkat Kesalahan

Metode analisis jalur yang digunakan untuk menganalisis hubungan antarvariabel laten dan indikator dalam PLS terdiri dari dua tahap:

- a. *Outer Model/Measurement Model*, yaitu menunjukkan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. *Outer model* diukur dengan:
 1. *Convergent Validity*. *Convergent validity* dilihat dari nilai *outer loadingsnya*, apabila nilai *outer loadingsnya* lebih besar dari 0,5 dan nilai *t-statistic* > t tabel maka korelasi dianggap baik.
 2. *Discriminant Validity (AVE)*. *Construct* dapat dianggap baik apabila nilai AVE diatas 0,5.
 3. *Composite Reliability*. Nilai *composite reliability* yang baik apabila memiliki nilai $\geq 0,70$.
- b. *Inner Model/Structural Model*, yaitu menunjukkan hubungan antarvariabel laten. *Structural model* diuji dengan:
 1. Analisis jalur (*path analysis*), nilai *path analysis* dapat diketahui dari hasil *path coefficients* dan *t-values* untuk signifikansi model prediksi.
 2. *Goodness of fit*, nilai *goodness of fit* diperoleh dari koefisien determinasi (R^2).

Hasil

Analisis Deskriptif

Deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing indikator variabel penelitian yang ada pada kuisisioner dijelaskan dengan menggunakan rata-rata (*mean*). Rata-rata dikategorikan berdasarkan interval kelas yang diperoleh dari selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Pada penelitian ini interval kelas pada masing-masing kategori adalah 0,80 yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kategori Rata-rata Jawaban Responden

No.	Kategori	Interval
1.	1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju (STS) / Sangat Rendah
2.	1,80 – 2,60	Tidak Setuju (TS) / Rendah
3.	2,60 – 3,40	Netral (N) / Cukup
4.	3,40 – 4,20	Setuju (S) / Tinggi
5.	4,20 – 5,00	Sangat Setuju (SS) / Sangat Tinggi

Sumber : Data primer diolah 2017

Berdasarkan hasil kuisisioner pada masing-masing variabel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) tercantum pada tabel 2. Variabel dukungan atasan menunjukkan nilai 4,23 dengan kategori sangat tinggi. Variabel kejelasan tujuan menunjukkan

nilai 4,21 dengan kategori sangat tinggi. Variabel pelatihan menunjukkan nilai 4,27 dengan kategori sangat tinggi. Variabel penerapan SAKD menunjukkan nilai 4,06 dengan kategori tinggi.

Tabel 2. Rata-rata variabel pada setiap variabel

Variabel	Keterangan	Rata-rata Variabel (<i>Mean</i>)	Kategori
X ₁	Dukungan Atasan	4,23	SS
X ₂	Kejelasan Tujuan	4,21	SS
X ₃	Pelatihan	4,27	SS
Y	SAKD	4,06	S

Sumber : Data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 2, membuktikan bahwa atasan atau pemimpin pada setiap OPD Kabupaten Banyuwangi selalu mendukung dalam penggunaan SAKD agar dapat meningkatkan kinerja dan mendapatkan output yang lebih baik. Rata-rata terendah sebesar 3,98 terletak pada pernyataan poin ke 4 yaitu pimpinan selalu memberikan *reward* kepada bawahannya. Rata-rata tertinggi sebesar 4,37 terletak pada poin ke 3 yaitu pimpinan selalu berusaha untuk memotivasi para pegawai.

Pada variabel kejelasan tujuan menunjukkan bahwa tujuan yang jelas merupakan salah satu hal yang paling utama pada OPD Kabupaten Banyuwangi ketika akan menerapkan SAKD agar apa yang akan dilakukan sesuai dengan target yang akan dicapai. Rata-rata terendah mengenai kejelasan tujuan sebesar 4,03 terletak pada pernyataan ke 4 yaitu perencanaan yang dilakukan atas dasar saran dan masukan dari para pegawai, sedangkan rata-rata tertinggi sebesar 4,43 terletak pada poin 6 yaitu setiap pegawai dalam mencapai target harus sesuai dengan standar operasional kerja.

Kategori sangat tinggi pada program pelatihan menunjukkan bahwa program pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat bagi para pegawai OPD Kabupaten Banyuwangi agar dapat meningkatkan kemampuan para pegawai dalam menggunakan SAKD. Rata-rata terendah mengenai pelatihan sebesar 4,18 terletak pada pernyataan poin ke 2 yaitu dalam menjalankan pelatihan pegawai selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai suka atau tidaknya dalam menjalani pelatihan, sedangkan rata-rata tertinggi sebesar 4,37 terletak pada pernyataan poin ke 5 yaitu pembelajaran teori yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat berguna didalam proses melaksanakan aktifitas profesi.

Penerapan SAKD dengan kategori tinggi menunjukkan bahwa SAKD yang telah diterapkan pada OPD Kabupaten Banyuwangi dapat menghasilkan output yang berguna bagi para pegawai dan masyarakat, selain itu juga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Rata-rata terendah mengenai penerapan SAKD sebesar 3,86 terletak pada pernyataan poin ke 4 yaitu sistem informasi akuntansi selalu memberikan output yang kecil dari kemungkinan kesalahan, sedangkan rata-rata tertinggi sebesar 4,28 terletak pada pernyataan poin ke 1 yaitu sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat menyediakan informasi yang akurat bagi pimpinan dan seluruh pegawai.

Uji Outer Model (Uji Indikator)

Convergent Validity

Convergent validity dilihat dari nilai *outer loadingsnya*, korelasi dianggap baik apabila nilai *outer loadingsnya* lebih besar dari 0,5 dan signifikansi *t-statistic* > 1,66 untuk hipotesis *one tailed*. Hasil *outer loadings* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Nilai Loadings	T Statistics
X1.1 ← Dukungan Atasan (X1)	0,710	6,790
X1.2 ← Dukungan Atasan (X1)	0,857	25,392
X1.3 ← Dukungan Atasan (X1)	0,832	25,593
X1.4 ← Dukungan Atasan (X1)	0,820	18,352
X2.1 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,767	15,340
X2.10 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,651	8,479
X2.2 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,776	17,669
X2.3 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,672	8,255
X2.4 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,695	13,444
X2.5 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,768	14,133
X2.6 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,740	16,734
X2.7 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,745	16,993
X2.8 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,763	20,287
X2.9 ← Kejelasan Tujuan (X2)	0,678	10,251
X3.1 ← Pelatihan (X3)	0,698	10,538
X3.3 ← Pelatihan (X3)	0,712	10,169
X3.4 ← Pelatihan (X3)	0,623	8,452
X3.5 ← Pelatihan (X3)	0,790	20,771
X3.6 ← Pelatihan (X3)	0,672	11,866
X3.7 ← Pelatihan (X3)	0,829	22,821
X3.8 ← Pelatihan (X3)	0,790	14,890
Y.1 ← Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,775	21,727
Y.2 ← Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,722	14,062
Y.3 ← Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,756	18,970
Y.4 ← Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,646	6,990
Y.5 ← Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,783	20,763
Y.6 ← Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,654	9,043

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan hasil *outer loadings* yang ditunjukkan pada tabel 3 menghasilkan bahwa semua indikator dapat dinyatakan valid, karena memiliki nilai *loading* diatas 0,5. Semua indikator telah memiliki pengaruh signifikan terhadap *construct*-nya masing-masing karena memiliki nilai *t-statistic* lebih dari 1,66.

Discriminant Validity

Discriminant Validity diukur dengan melihat nilai AVE yang digunakan untuk mengetahui validitas *construct* yang digunakan dalam penelitian. *Construct* model dapat dianggap baik apabila nilai AVE diatas 0,5. Hasil AVE dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Discriminant Validity (AVE)

	AVE
Dukungan Atasan (X1)	0,651
Kejelasan Tujuan (X2)	0,529
Pelatihan (X3)	0,539
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,525

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan hasil uji *Discriminant validity* model penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai AVE keempat variabel tersebut memiliki *discriminant validity* yang cukup karena memiliki nilai diatas 0,5 sehingga dapat dikatakan valid.

Composite Reliability

Nilai *composite reliability* yang baik apabila memiliki nilai $\geq 0,70$. Hasil *composite reliability* model pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Composite Reliability

	Composite Reliability
Dukungan Atasan (X1)	0,881
Kejelasan Tujuan (X2)	0,918
Pelatihan (X3)	0,890
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,868

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan hasil *composite reliability* model penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5 diketahui bahwa semua *construct* menunjukkan nilai diatas 0,70, hal ini menunjukkan bahwa semua *construct* model penelitian layak untuk dilakukan uji *inner model*.

Uji Inner Model (Uji Struktural)

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Hasil *path analysis* dapat diketahui dari besarnya koefisien jalur struktural (*path coefficients*) dan nilai *t-values* untuk signifikansi model prediksi. Hasil *path coefficients* model penelitian dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Hasil Path Coefficients (Uji Hipotesis)

	Coefficients beta	Standard Error	T Statistics	Berpengaruh T Statistics > 1,96
Dukungan Atasan (X1) → Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,530	0,080	6,633	Berpengaruh
Kejelasan Tujuan (X2) → Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	-0,007	0,078	0,094	Tidak Berpengaruh
Pelatihan (X3) → Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,301	0,081	3,718	Berpengaruh

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 6 hasil *path coefficients* (Uji Hipotesis), maka hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,530X1 - 0,007X2 + 0,301X3 + 0,463$$

Dari hasil uji *path analysis* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis bahwa dukungan atasan berpengaruh pada sistem akuntansi keuangan daerah terbukti berpengaruh secara positif dengan koefisien sebesar 0,530 dengan tingkat signifikansi $6,633 > 1,96$. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima.

2. Hipotesis bahwa kejelasan tujuan berpengaruh pada sistem akuntansi keuangan daerah ditolak. Hal ini terbukti dengan hasil koefisien $-0,007$ dengan tingkat signifikansi $0,094 < 1,96$.
3. Hipotesis bahwa pelatihan berpengaruh pada sistem akuntansi keuangan daerah terbukti berpengaruh secara positif dengan koefisien sebesar $0,301$ dengan tingkat signifikansi $3,718 > 1,96$. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima.
4. Koefisien jalur dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai error sebesar $0,463$. Artinya terdapat variabel lain yang mempengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar $46,3\%$.

Goodness of Fit

Nilai *goodness of fit* diperoleh dari koefisien determinasi (R^2). Hasil koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

	<i>R Square Adjusted</i>
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	0,537

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *R Square Adjusted* diperoleh sebesar $0,537$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabilitas sistem akuntansi keuangan daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabilitas dukungan atasan (X1), kejelasan tujuan (X2), dan pelatihan (X3) sebesar $53,7\%$. Sedangkan sisanya sebesar $46,3\%$ dijelaskan oleh variabilitas lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

Diskusi

Dukungan Atasan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah dengan koefisien beta sebesar $0,530$. Bukti ini menunjukkan bahwa **hipotesis pertama (H_1) diterima**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yati (2013) yang menyatakan bahwa dukungan atasan memiliki hubungan positif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Sumber daya yang diperlukan untuk implementasi SAKD telah disediakan oleh pemerintah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih baik untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulistia *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan SAKD pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Perolehan nilai rata-rata tertinggi dari tanggapan responden terhadap variabel dukungan atasan menunjukkan pernyataan bahwa pimpinan selalu berusaha memotivasi seluruh pegawai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara aktif memberikan dukungan, pengarahan, dan masukkan pada setiap pekerjaan pegawainya dalam menggunakan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk mencapai tujuan organisasi yaitu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)*, faktor persepsi kemudahan penggunaan dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) akan mempermudah pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan pekerjaannya. Dukungan atasan sangat penting dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem yang digunakan. Hal ini dikarenakan atasan memiliki kekuasaan atas sumber daya (sistem) yang dibutuhkan, dimana sistem yang dibutuhkan disesuaikan dengan rencana organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan sistem baru merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah, sehingga sistem baru yang dikembangkan semestinya sesuai dengan rencana organisasi guna mendorong tercapainya tujuan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Dukungan atasan mampu meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan menciptakan hubungan sinergitas antara atasan dan karyawan yang mendukung satu sama lain sehingga tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dapat direalisasikan dengan baik.

Kejelasan Tujuan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah dengan koefisien beta sebesar 0,007. Bukti ini menunjukkan bahwa **hipotesis kedua (H₂) ditolak**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulistia *et al.*, (2017), dan Latifah dan Sabeni (2017) yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap kegunaan SAKD Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pegawai jarang menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyelesaikan tugas yang dibebankannya, akibatnya kejelasan tujuan pada organisasi tersebut tidak diprioritaskan dalam program penggunaan SAKD sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

Perolehan nilai rata-rata terendah dari tanggapan responden terhadap variabel kejelasan tujuan menunjukkan pernyataan bahwa perencanaan yang dilakukan atas dasar saran dan masukan dari para pegawai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pegawai merasa perencanaan organisasi dalam mencapai tujuan pemerintah daerah tidak melibatkan saran dan masukan dari para pegawai.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)*, menyatakan bahwa seseorang akan menggunakan sistem apabila sistem tersebut akan memberikan kemudahan dan juga manfaat bagi penggunaannya, tetapi dalam hal ini pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merasa bahwa sistem yang digunakan tidak memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan pegawai tidak dapat memahami bagaimana cara mereka untuk mencapai tujuan organisasi menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Kejelasan tujuan di dalam organisasi merupakan tanggungjawab dari seluruh pegawai untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Selain itu, para pegawai organisasi juga bertanggungjawab atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan dan secara kolektif

memiliki kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi dalam membuat komitmen atas arah tertentu. Apabila tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan saran dan masukkan dari kelompok tertentu dan tidak melibatkan seluruh pegawai pemerintah daerah yang ada, maka kejelasan tujuan tidak mampu meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pelatihan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah dengan koefisien beta sebesar 0,301. Bukti ini menunjukkan bahwa **hipotesis ketiga (H₃) diterima**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan SAKD di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yati (2013) yang menyatakan bahwa pelatihan berhubungan positif dengan kegunaan SIKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Sikap dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam hal ini sikap dibentuk melalui pelatihan SAKD, pelatihan yang diberikan secara menyeluruh bagi seluruh pegawai akan berdampak pada peningkatan manfaat bagi pengguna dalam menghasilkan laporan keuangan yang optimal.

Perolehan nilai rata-rata tertinggi dari tanggapan responden terhadap variabel pelatihan menunjukkan pernyataan bahwa pembelajaran teori yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat berguna di dalam proses melaksanakan aktivitas profesi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pegawai merasa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM), dalam persepsi kebermanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memberikan manfaat di berbagai aspek seperti menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tujuan pelatihan secara umum diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai yang diharapkan baik pada masa sekarang dan masa depan. Pelatihan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) disesuaikan berdasarkan kebutuhan individu dan organisasi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan dari pengguna sistem dalam hal ini adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan individu dan organisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah

1. Dukungan atasan berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.
2. Kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.
3. Pelatihan berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.

Keterbatasan

Kuisisioner yang dikirimkan ke kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum dapat dipastikan apakah telah diisi oleh pegawai dengan kriteria yang telah ditentukan pada penelitian ini. Variabel kejelasan tujuan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu transparansi sasaran, perencanaan rangkaian kegiatan, target, pengawasan, dan sanksi, masih kurang dapat menunjukkan kontribusi dukungan atasan sehingga berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Kontribusi variabel dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,537%, sedangkan sisanya sebesar 0,463% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Saran

Upaya memperkuat hasil penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat melakukan observasi secara langsung atau dengan metode wawancara. Perlu menambahkan indikator lain untuk mengukur variabel kejelasan tujuan seperti tingkat pemahaman pegawai. Perlu menambahkan variabel independen lainnya yang mungkin memiliki pengaruh kuat terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) seperti variabel lingkungan kerja, sikap individu, dan kinerja pegawai. Selain itu, mungkin bisa menggunakan objek penelitian di pemerintah daerah lain yang ada di Indonesia.

Implikasi Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini yaitu (1) sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam memberikan informasi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; (2) meningkatkan efektivitas pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan pekerjaannya yang didukung oleh sumber daya dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dijalankan; (3) meningkatkan manajemen perencanaan agar mencapai target yang telah ditentukan dengan pemetaan kejelasan tujuan yang dipahami oleh seluruh pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Daftar pustaka

- Albrecht, D. 1990. *The determinants of the market reaction to an announcement of a change in auditor*. Virginia Polytechnic Institute and State University : Ph.D. dissertation,
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.

Bodnar, H. George dan William S. Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 2017. Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik. Diakses pada 13 Maret 2019. Bpkad.banyuwangikab.go.id.

Chenhall, R.H. 2004. The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management. *Behavioral Research in Accounting* 16. Vol. 4 No.2. Pp. 67-72.

Fatmawati, Endang. 2015. *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Iqra'*. Vol.9 No.1. Pp. 116-135.

Irsyadi, Fadhli. 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kinerja Individual Dengan Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Sebagai Variabel Intervening. *JOM VEKON*. Vol.2 No.2. Pp. 1-15.

Latifah dan Sabeni. 2017. Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Benefita*. Vol.2 No.3. Pp.78-91.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Sari, Nanda Rakhmata. 2017. Pengaruh Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan dan Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif Sebagai Variabel Intervening. *JOM VEKOM*. Vol.4 No.1. Pp.1-15.

Yati. 2013. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi pada Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. *Majalah Ilmiah GEMA*. Vol.27 No.49. Pp.236-252.

Yulistia, Novi Yanti dan Ika Purwasih. 2017. Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Benefita*. Vol.2 No.3. Pp.78-91.

Warren, S. Carl, James M. Reeve dan Jonathan E. Duchac. 2014. *Accounting, Edition 25*. USA : Cengage Learning.